

“KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI INDAH KAPUK 2: DAMPAK TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN TELUKNAGA”

Clement Alexandrico Waruwu *)

Email: clement.andri123@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah menjadikan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) sebagai konsekuensi logis untuk mengatasi kebutuhan lahan yang semakin tinggi dan guna meningkatkan perekonomian sektoral maupun nasional. Namun, pada kenyataannya pembangunan ini justru menghadirkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat di Kecamatan Teluknaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak proyek reklamasi PIK 2 terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Penelitian ini juga didasarkan pada teori perubahan sosial dan ekonomi serta konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam proyek reklamasi pantai tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyek PIK 2 memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Dari aspek sosial, nelayan mengalami gangguan aktivitas karena pagar laut dan konflik dengan aparat keamanan karena adanya larangan untuk menjala ikan, sementara mobilitas spasial masyarakat juga menjadi terhambat akibat infrastruktur rusak dan banjir, relokasi paksa, serta ancaman kesehatan akibat debu dan kecelakaan akibat truk proyek. Dari aspek ekonomi, nelayan mengalami kerugian material, penurunan pendapatan drastis, serta meningkatnya pengangguran akibat hilangnya lahan pertanian. Dari sisi pembangunan berkelanjutan, proyek ini dinilai tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi, perlunya regulasi ketat untuk mengawasi pembangunan agar tidak menimbulkan eksternalitas ke berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang sudah seharusnya menjadi prioritas dalam setiap langkah pembangunan.

Kata kunci: Reklamasi Pantai, Perubahan sosial-ekonomi, Pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

The government has made the reclamation of Pantai Indah Kapuk (PIK 2) a logical consequence to address the increasing land needs and to improve both sectoral and national economies. However, in reality, this development has presented negative externalities for communities in Teluknaga District. This research aims to analyze the impact of the PIK 2 reclamation project on social and economic changes in communities within Teluknaga District, Tangerang Regency. The approach used is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature review. This research is also based on theories of social and economic change and the concept of sustainable development, assessing the effectiveness of policies implemented in the coastal reclamation project. The results of this research show that the PIK 2 project has significant impacts on the social and economic aspects of Teluknaga District communities. From the social aspect, fishermen experience disruption of activities due to sea barriers and conflicts with security personnel because of fishing prohibitions, while the spatial mobility of communities is also hampered due to damaged infrastructure and flooding, forced relocation, and health threats from dust and accidents caused by project trucks. From the economic aspect, fishermen suffer material losses, drastic income decreases, and increased unemployment due to the loss of agricultural land. From a sustainable development perspective, this project is considered to not involve communities in decision-making and benefits capital owners more than local communities who depend on natural resources. Based on these findings, the research recommends a more inclusive approach in planning and implementing reclamation projects, the need for strict regulations to monitor development to prevent externalities in various aspects of life, especially on social and economic aspects of local communities who should be prioritized in every development step.

Keywords: *Coastal Reclamation, Socio-Economic Changes, Sustainable Development*

A. PENDAHULUAN

Tingginya tingkat pertumbuhan sebuah daerah apabila tidak diimbangi dengan perluasan wilayah sebuah daerah maka daerah tersebut akan muncul sebuah akar dari segala masalah yaitu kepadatan penduduk, yang dimana dari kepadatan penduduk ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah sosial, ekonomi, dan lainnya.

Dikarenakan adanya desakan pertumbuhan DKI Jakarta yang cukup tinggi maka keterbutuhan lahan pun semakin meningkat, sedangkan lahan yang ada di Ibu kota saat ini semakin terbatas. Hingga

sulitnya proses pembebasan lahan guna perluasan wilayah bagi pengembangan Kota Jakarta, telah mendesak Pemerintah Jakarta untuk membuat kebijakan reklamasi pantai sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Supono (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diperlukan sebagai pendorong dan penopang keberlanjutan Kota Jakarta agar bisa menyaingi kota-kota besar yang ada di negara lain. Kebijakan ini ditandai dengan adanya Pemerintah Kota Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi di wilayah

Pantai Utara Jakarta.

Reklamasi pantai, yang didefinisikan sebagai kegiatan menambah lahan daratan ke arah laut melalui penimbunan atau pengeringan, menjadi alternatif untuk mengembangkan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Kebijakan reklamasi pantai ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa reklamasi boleh dilakukan jika menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan biayanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki wewenang dalam pemberian izin proyek reklamasi PIK 2 dengan tujuan memperluas wilayah dan meningkatkan nilai guna lahan untuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun dalam pengimplementasiannya kebijakan ini justru menyebabkan sebuah implikasi terhadap masyarakat yang ada di sekitar PIK 2 dan melahirkan sebuah kontra di masyarakat terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan persetujuan atas keberlanjutan proyek ini. Dikarenakan kebijakan ini yang seharusnya ditujukan untuk dijadikan sebuah inovasi yang akan memberikan banyak manfaat dan kepentingan bagi masyarakat luas untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, namun hal ini bertentangan dengan temuan Suhardi dan

Raffiudin (2023) menegaskan bahwa kenyataannya kebijakan ini dijadikan sebagai sebuah peluang atau kesempatan bagi orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu untuk mengambil sebuah keuntungan atau bertujuan untuk memanfaatkan kepentingan publik menjadi kepentingan bagi sekelompok orang saja.

Hal ini diperkuat dengan temuan Firmansyah (2016) yang menjelaskan bahwa dari kebijakan reklamasi pantai ini hanya bisa dirasakan oleh kalangan orang yang memiliki finansial ke atas atau orang kaya, pada kenyataannya reklamasi pantai ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial dan menciptakan kelas-kelas sosial saja karena perumahan yang ada di reklamasi pantai ini umumnya hanya dimiliki oleh kalangan kelas sosial ke atas saja.

Daerah yang merasakan Implikasi sosial dan ekonomi terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) adalah Kecamatan Teluknaga, proyek ini berdiri diatas lahan yang menghimpit tiga desa di Kecamatan Teluknaga yang berada di Kecamatan Tangerang yaitu Desa Muara, Desa Lemo, dan Desa Salembaran. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan ini menyebabkan warga di Kecamatan Teluknaga menjadi merasakan daerahnya menjadi banjir, warga menjadi kehilangan akses jalan, bahkan ada warga dari kecamatan ini yang bekerja sebagai nelayan harus sampai kehilangan pekerjaannya akibat

dari pembangunan proyek ini (Zahira, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan reklamasi pantai di PIK 2 terhadap kehidupan masyarakat sekitar, serta bagaimana peran pemerintah melalui perspektif masyarakat dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. TUJUAN PENELITIAN

Meninjau dari permasalahan yang ada terkait proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ini terhadap masyarakat di Kecamatan Teluknaga. Selain itu juga, penelitian ini akan menilai kesesuaian kebijakan reklamasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil temuan yang ada pada masyarakat terdampak di Kecamatan Teluknaga.

C. KERANGKA TEORI

a) Kebijakan Reklamasi Pantai

Reklamasi pantai merupakan upaya strategis untuk membentuk lahan baru melalui pengeringan, pengurugan, atau drainase guna meningkatkan nilai guna lahan yang tidak terpakai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi

didefinisikan sebagai upaya memperluas lahan dengan menjadikan daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Secara khusus, reklamasi pantai merupakan pembuatan lahan baru di wilayah pantai untuk meningkatkan nilai guna lahan dari aspek sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Di Jakarta, reklamasi Pantai Utara dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk. Proyek ini bertujuan memperluas wilayah untuk mengembangkan kota dan menciptakan pemukiman yang dapat menampung sekitar 1,5 juta penduduk. Kebijakan reklamasi umumnya diterapkan di kota-kota besar yang memiliki masalah keterbatasan lahan dan tidak memungkinkan melakukan pemekaran ke arah daratan.

Diposaptono (2016) menegaskan bahwa meskipun reklamasi merupakan solusi untuk menanggulangi masalah keterbatasan lahan, tidak semua wilayah pesisir layak direklamasi. Sebelum implementasi, perlu memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, rencana tata ruang laut yang tepat, serta jaminan penghidupan masyarakat nelayan. Reklamasi diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan ekosistem.

Dampak reklamasi bersifat luas, tidak hanya lokal, dan memiliki konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak positif reklamasi meliputi pembukaan peluang pembangunan di wilayah pesisir, peningkatan transportasi air, kemajuan pariwisata bahari, serta peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Dengan hadirnya PIK 2, tercipta pusat aktivitas ekonomi baru di Jakarta Utara yang menarik investor domestik dan internasional. Reklamasi juga meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi lainnya.

Namun, reklamasi juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial. Wilayah pantai yang sebelumnya menjadi ruang publik berubah menjadi ruang privat, menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Dari aspek ekonomi, reklamasi berdampak pada mata pencaharian nelayan dan petani tambak karena wilayah tangkapan mereka berubah menjadi daratan, sehingga hasil tangkapan dan pendapatan mereka menurun.

Untuk meminimalisir dampak negatif, diperlukan pendekatan rasional komprehensif sebelum penerapan kebijakan. Menurut Dunn (2013), rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi enam kriteria utama: efektivitas (pencapaian tujuan), efisiensi (penggunaan sumber daya minimal), kecukupan (pemenuhan kebutuhan), pemerataan (distribusi manfaat dan beban),

responsivitas (pemenuhan harapan masyarakat), dan ketepatan (rasionalitas substantif). Kriteria ini menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kebijakan reklamasi memberikan hasil optimal dengan dampak negatif minimal.

b) Perubahan Sosial dan Ekonomi

Dalam setiap perencanaan pembangunan, pemahaman faktor sosial di lingkungan sekitar menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Masyarakat sebagai konstituen negara memiliki peran dalam menilai dan memonitor implementasi pembangunan. Diskusi mengenai perubahan sosial-ekonomi berkaitan erat dengan aspek perencanaan karena adanya tuntutan perkembangan zaman. Soekanto (1983) mendefinisikan perubahan sebagai tanda yang muncul dalam masyarakat ketika pola-pola lama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan masalah. Perubahan sosial sendiri merupakan proses berkelanjutan dimana transformasi terjadi dari waktu ke waktu, sekecil apapun bentuknya (Lumintang, 2015).

Perubahan ekonomi dan sosial saling berkaitan dan bertumpu pada sistem sosial masyarakat. Analisis sistem sosial dapat mengungkap berbagai komponen yang sejalan dengan konsep ekonomi. Marimin (2007) menekankan bahwa sistem sosial mengedepankan interaksi antar aktor dengan melibatkan tujuan dan komponen sosial di dalamnya. Karl Marx dengan

konsep materialisme historisnya menempatkan struktur ekonomi sebagai titik awal aktivitas manusia yang mendorong sistem sosial dan mengakibatkan perubahan sosial. Marx membagi masyarakat menjadi infrastruktur (struktur ekonomi) dan suprastruktur (ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama). Perubahan dalam cara produksi dapat mengakibatkan perubahan dalam seluruh hubungan sosial manusia, yang dalam konteks masyarakat industri melibatkan konflik antara kelas borjuis dan proletar.

Pembangunan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 di Kecamatan Teluknaga telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian Mahendra dan Purwanti menunjukkan bahwa reklamasi dapat menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan yang merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Konflik lahan dan ketidakpuasan sosial sering muncul akibat proyek besar seperti ini, mengakibatkan pergeseran budaya dan perubahan mata pencaharian masyarakat (Harahap & Suryana, 2019). Djamil et al. (2022) menegaskan bahwa reklamasi dapat mengganggu aktivitas ekonomi tradisional seperti perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Sosial ekonomi merujuk pada status seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis

kegiatan ekonomi, tingkat pendapatan, pendidikan, usia, jenis tempat tinggal, dan kekayaan (Abdulsyani, 1994). Dalam penelitiannya Soekanto (2006) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat perubahan sosial termasuk kontak dengan budaya lain, kemajuan pendidikan formal, sikap positif terhadap kemajuan, toleransi terhadap perilaku non-konvensional, struktur masyarakat terbuka, keberagaman penduduk, ketidakpuasan terhadap aspek tertentu, orientasi masa depan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara faktor penghambat meliputi kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, kemajuan ilmu pengetahuan yang lambat, keterikatan pada tradisi, kepentingan yang tertanam kuat, ketakutan terhadap disintegrasi budaya, prasangka terhadap hal baru, hambatan ideologis, dan pandangan hidup yang negatif.

c) Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan oleh Emil Salim (1990), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. KLH (1990) mengukur pembangunan berkelanjutan melalui tiga standar: penggunaan sumber daya alam yang hemat, pencegahan pencemaran lingkungan, dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya memperhatikan

kebutuhan dan kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga berupaya memastikan distribusi manfaat yang merata antar generasi, dengan tetap memprioritaskan keseimbangan ekologi.

Io (2010) dalam Tay & Rusmiwari (2019) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Meskipun risiko dari pembangunan saat ini tidak dapat sepenuhnya dihindari, dampaknya perlu diperhitungkan secara rasional bagi kehidupan sekarang dan masa depan.

Meskipun sederhana secara konsep, keberlanjutan bersifat kompleks dan multidimensional dalam penerapannya. Fauzi (2004) mengidentifikasi dua dimensi utama: dimensi waktu yang berhubungan dengan masa depan, dan dimensi interaksi yang melihat hubungan antara sistem ekonomi dengan sumber daya alam dan lingkungan. Sementara itu, Harris (2000) memperinci konsep ini menjadi tiga aspek: keberlanjutan ekonomi yang menghindari ketidakseimbangan sektoral, keberlanjutan lingkungan yang memelihara sumber daya dan mencegah eksploitasi berlebihan, serta keberlanjutan sosial yang mengedepankan kesetaraan. Strategi pembangunan berkelanjutan biasanya berlandaskan pada empat komponen: pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, dan perspektif jangka

panjang.

Dalam konteks pembangunan pesisir, konsep ini mengharuskan adanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir sambil tetap memprioritaskan dampak lingkungan dan memperhitungkan risiko jangka panjang. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan evaluasi implementasi kebijakan yang memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluknaga.

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas situs penelitian ini berada di beberapa desa yang berada di Kecamatan Teluknaga, kabupaten Tangerang, Banten. Beberapa desa di Kecamatan ini yang akan diambil sebagai penelitian ialah Desa Tanjung Pasir, Desa Muara, Desa Tanjung Burung, dan Desa Salebaran Jati. Lokasi ini dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut terdampak langsung dari adanya Pembangunan Reklamasi PIK 2.

Dalam menentukan informan yang tepat untuk penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling diterapkan dengan cara menentukan informan secara selektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria ini mencakup pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dengan kebijakan reklamasi PIK 2, seperti tokoh masyarakat maupun warga yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi tersebut.

Dengan mendapatkan informan sesuai kriteria peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta observasi. Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data yang mana mencakup tiga tahapan utama, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menjamin kualitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan temuan wawancara terhadap dokumentasi dan informan berbeda dengan tujuan untuk menghasilkan data objektif dan mendalam terkait penelitian ini.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial

Implementasi proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) telah menghadirkan beragam dampak sosial yang signifikan

terhadap masyarakat di Kecamatan Teluknaga, mencakup Desa Tanjung Pasir, Muara, Salemban Jati, dan Tanjung Burung. Meski proyek ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun secara bersamaan telah menimbulkan eksternalitas negatif dalam dimensi sosial bagi komunitas setempat.

Aktivitas nelayan di beberapa desa sekitar mengalami gangguan fundamental akibat konstruksi pagar laut oleh pihak pengembang. Pagar ini menjadi rintangan signifikan yang mengancam keselamatan para nelayan, terutama ketika melaut pada malam hari. Selain itu, nelayan skala kecil juga menghadapi restriksi formal terhadap akses zona penangkapan ikan di sekitar kawasan PIK 2. Situasi ini sering memicu konflik antara nelayan dengan petugas keamanan, berupa pertentangan lisan hingga ancaman penangkapan dan penyitaan alat tangkap, menunjukkan kesenjangan nyata antara upaya pembangunan dan upaya mempertahankan mata pencaharian tradisional.

Pembangunan PIK 2 tidak hanya menggerus basis ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga mengikis struktur sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun di kalangan nelayan. Penurunan drastis dalam hasil tangkapan dan pendapatan telah menciptakan efek domino yang berujung pada perubahan fundamental dalam tatanan sosial. Banyak nelayan pendatang yang telah

menjadi bagian integral dari komunitas terpaksa kembali ke daerah asal mereka karena biaya hidup yang meningkat tidak dapat diimbangi dengan pendapatan dari melaut.

Mobilitas spasial masyarakat Desa Tanjung Pasir juga terganggu akibat saluran pembuangan air dari PIK 2 yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Air yang meluap ke jalan permukiman warga menjadi penghambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Permasalahan ini semakin kompleks saat musim penghujan, dimana genangan air yang tidak terserap dengan baik menyebabkan permukaan jalan menjadi licin dan berbahaya, menimbulkan risiko keselamatan dan menghambat mobilitas masyarakat.

Desa Tanjung Burung mengalami peningkatan frekuensi dan intensitas banjir akibat keberadaan tembok tinggi yang membatasi pemukiman masyarakat dengan kawasan PIK 2. Sebelumnya, banjir yang terjadi hanya berlangsung sebentar karena adanya ladang pertanian dan tambak ikan sebagai daerah resapan air. Namun, hilangnya daerah resapan dan adanya tembok pembatas menyebabkan masyarakat harus menghadapi banjir dengan durasi lebih lama dan debit air yang lebih tinggi, mengganggu mobilitas warga karena akses jalan yang terendam.

Proses relokasi permukiman juga menimbulkan berbagai kendala administratif

dan praktis. Masyarakat menghadapi ketidakpastian dalam pembayaran kompensasi yang dilakukan secara cicilan, sementara sertifikat tanah mereka sudah ditarik terlebih dahulu. Ketika rumah-rumah warga digusur, alokasi rumah pengganti belum tersedia, menciptakan kebingungan karena dana kompensasi belum sepenuhnya diterima. Meskipun kavling pengganti akhirnya disediakan, permasalahan tetap muncul karena surat tanah belum diterima oleh masyarakat.

Alih fungsi lahan pertanian di Desa Salemban Jati dilakukan dengan cara yang intimidatif. Meskipun awalnya enggan, petani terpaksa menjual lahan sawah mereka karena adanya urukan tanah merah yang terus menghimpit dan membuat lahan pertanian tidak produktif lagi. Praktik serupa juga terjadi pada pemukiman di Kampung Sentiong, dimana pengurukan tanah merah di sekitar pemukiman menjadi metode untuk melemahkan posisi tawar masyarakat dalam negosiasi harga.

Keberadaan proyek PIK 2 juga membawa dampak kesehatan serius bagi warga setempat, terutama melalui polusi udara dari aktivitas pengurukan tanah. Anak-anak sebagai kelompok rentan mengalami gangguan pernapasan seperti flu dan batuk akibat paparan debu yang terus-menerus. Selain itu, lalu lalang truk-truk proyek yang beroperasi di luar jadwal menciptakan risiko kecelakaan yang signifikan di ruas jalan

umum, bahkan telah menyebabkan korban mengalami kecacatan permanen dan kehilangan nyawa.

Dampak Ekonomi

Proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Teluknaga telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat pesisir. Nelayan dan petani yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kekayaan sumber daya alam setempat kini menghadapi realitas pahit perubahan lanskap yang drastis. Bukan hanya perubahan geografis yang terjadi, tetapi juga pergeseran mendasar pada pola mata pencaharian tradisional yang telah berlangsung selama generasi.

Di tengah gemerlap pembangunan megaprojek ini, desa-desa seperti Tanjung Pasir menderita akibat perubahan pola gelombang laut. Tanpa pemecah ombak alami yang dulu melindungi teluk, gelombang kini langsung menghantam area pesisir dengan kekuatan penuh, menyebabkan kerusakan signifikan pada kapal-kapal nelayan tradisional. Para nelayan yang dahulu dapat melaut dengan tenang kini harus menanggung beban biaya perbaikan kapal yang melambung tinggi, sambil kehilangan hari-hari produktif untuk mencari nafkah.

Situasi semakin diperburuk di Desa Tanjung Burung yang dilanda banjir dengan intensitas tinggi dan tidak terduga. Kendaraan warga sering terendam,

menyebabkan kerusakan komprehensif pada mesin dan sistem elektronik. Aktivitas ekonomi utama seperti pertanian dan peternakan pun lumpuh ketika lahan pertanian tergenang dan ternak menghadapi risiko kesehatan serius. Banyak petambak dan petani terpaksa beralih menjadi buruh proyek dengan penghasilan yang jauh lebih rendah dari sekitar Rp150.000 menjadi hanya Rp80.000 per hari, hal tersebut mencerminkan kemunduran drastis dalam kualitas kehidupan ekonomi mereka.

Nasib yang tidak kalah memprihatinkan dialami nelayan kecil di Desa Salemban Jati. Akses mereka terhadap sumber daya laut kini terhalang oleh jaring pembatas proyek PIK 2. Jaring dengan mata yang sangat kecil, yang dipasang untuk menahan sampah, justru menghalangi pergerakan dan migrasi ikan. Dampaknya, populasi ikan di wilayah tangkapan nelayan menurun drastis. Pendapatan mereka anjlok dari sekitar Rp200.000 menjadi hanya Rp50.000 per hari, meskipun jam kerja telah diperpanjang dari pagi hingga menjelang maghrib.

Perubahan ekosistem laut juga menghantam Desa Muara dengan keras. Proses reklamasi yang melibatkan teknik penguatan tanah dan modifikasi struktur pesisir telah memusnahkan populasi bibit rajungan dan berbagai biota laut lainnya yang sebelumnya melimpah. Nelayan yang dulu bisa mendapatkan tangkapan puluhan

kilogram hingga satu kwintal per hari dengan penghasilan Rp200.000-500.000, kini harus puas dengan pendapatan sekitar Rp50.000 saja. Mereka juga dipaksa menempuh jarak lebih jauh untuk mencari ikan, menambah biaya operasional dan risiko kerusakan kapal.

Sementara itu, di Kampung Sentiong, Desa Salembaran Jati, alih fungsi lahan pertanian telah merampas mata pencaharian utama para petani. Mereka yang telah menginvestasikan modal untuk bibit dan persiapan lahan tiba-tiba harus menghadapi kerugian berlipat ketika lahan mereka diuruk untuk pembangunan tanpa konfirmasi sebelumnya. Tanpa pilihan, banyak petani beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan jauh lebih rendah.

Berdasarkan penguraian hasil temuan di lapangan, proyek reklamasi PIK 2 telah mengakibatkan perubahan fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Sistem ekonomi yang dahulu stabil dan berkelanjutan kini berganti dengan ketidakpastian yang semakin mencekam. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam, kerusakan infrastruktur, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan drastis ini telah menciptakan jurang kesenjangan ekonomi yang semakin dalam. Dampak domino meluas ke berbagai sektor ekonomi lokal, memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang kini terpinggirkan di tengah pembangunan besar-besaran.

Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah adanya Reklamasi PIK 2

Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) telah mengakibatkan perubahan mendalam pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Sebelum proyek reklamasi ini dilaksanakan, kawasan tersebut merupakan ruang hidup yang produktif bagi masyarakat tradisional di desa-desa seperti Tanjung Pasir, Muara, Salembaran Jati, dan Tanjung Burung. Mereka menjalankan kehidupan dengan mata pencaharian turun-temurun sebagai nelayan, petani, dan pengelola tambak ikan—aktivitas yang tidak hanya menjadi sumber penghasilan tetapi juga membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pasca implementasi proyek reklamasi PIK 2, terjadi perubahan drastis dalam pola mata pencaharian masyarakat lokal. Para nelayan mengalami penurunan pendapatan signifikan akibat pembatasan akses ke wilayah tangkapan ikan tradisional. Pembangunan pagar laut oleh pengembang menciptakan hambatan fisik yang mengancam keselamatan nelayan, terutama saat melaut di malam hari. Nelayan kecil juga sering mengalami konflik dengan petugas keamanan PIK 2 saat mencoba menangkap ikan di sekitar kawasan reklamasi, yang tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi tetapi juga merusak struktur sosial komunitas pesisir.

Sebelum kehadiran PIK 2, infrastruktur alami seperti lahan pertanian dan tambak berfungsi sebagai sistem drainase yang efektif untuk mengendalikan banjir. Air hujan dapat terserap dengan baik dan banjir yang terjadi biasanya surut dalam waktu singkat. Namun, pasca pembangunan PIK 2, terjadi perubahan ekosistem yang menyebabkan gangguan signifikan pada sistem hidrologi alami. Tembok tinggi antara kawasan reklamasi dan permukiman warga telah menghambat aliran air, mengakibatkan banjir dengan durasi lebih panjang hingga dua hari dan ketinggian air mencapai satu meter, yang secara langsung mengganggu mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Perubahan tata ruang kawasan pesisir juga berdampak pada kondisi pertanian di wilayah tersebut. Sebelumnya, masyarakat memiliki lahan pertanian produktif sebagai sumber penghasilan utama. Namun, praktik pengurukan tanah merah oleh pengembang telah menghimpit lahan pertanian, menjadikannya tidak produktif. Petani yang awalnya enggan menjual lahan mereka pada akhirnya terpaksa melepaskan hak atas tanah dengan harga yang tidak sepadan akibat tekanan dan intimidasi. Proses pengambilalihan lahan ini telah mendegradasi sistem mata pencaharian tradisional yang merupakan warisan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa transformasi kawasan pesisir akibat reklamasi PIK 2 telah menghasilkan perubahan fundamental dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Meskipun proyek ini mungkin mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan pengembangan kawasan hunian modern, masyarakat lokal justru mengalami marginalisasi dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam proses pembangunan, di mana kepentingan masyarakat pesisir tradisional seringkali terabaikan oleh agenda pembangunan perkotaan yang lebih besar.

Meninjau Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Lingkungan

Proyek PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional menghadirkan paradoks pembangunan yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, proyek ini menjanjikan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun di sisi lain, perubahan spasial pesisir yang masif memunculkan pertanyaan kritis tentang keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan wilayah tersebut. Mengingat sensitivitas ekologis kawasan pesisir, peran pemerintah dan pengembang dalam mengelola dampak lingkungan menjadi sangat vital.

Desa Tanjung Pasir, yang terletak di garis terdepan pertemuan daratan dengan Laut Jawa, menjadi saksi nyata bagaimana

intervensi pembangunan mengubah karakteristik hidrodinamika pesisir secara signifikan. Perubahan ini merupakan konsekuensi langsung dari modifikasi garis pantai akibat reklamasi, yang berdampak pada aktivitas nelayan yang kapalnya seringkali terdampar akibat pasang air laut yang tinggi. Ironisnya, upaya konkret dari pemerintah setempat maupun pihak pengembang dalam mengatasi permasalahan ini masih minim.

Transformasi pesisir akibat pembangunan PIK 2 juga mempengaruhi pola banjir di wilayah sekitar. Desa Tanjung Burung menghadapi fenomena banjir yang sebelumnya tidak pernah dialami dengan intensitas seperti sekarang. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah proyek pembangunan berskala besar dapat menciptakan dampak berantai terhadap ekosistem sekitarnya, terutama pada masyarakat di wilayah pesisir yang rentan.

Meskipun pemerintah Kabupaten Tangerang telah merencanakan pembangunan tanggul sungai sebagai solusi struktural, ketidakmampuan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai mencerminkan lemahnya komitmen dalam menghadapi konsekuensi pembangunan berskala besar. Ketiadaan kepastian pembangunan tanggul menimbulkan kerentanan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tanjung Burung, menegaskan adanya

ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan.

Permasalahan lingkungan juga berdampak pada ekosistem biota laut di Desa Muara. Para nelayan merasakan penurunan drastis pada populasi ikan dan biota laut lainnya, yang menggerus fondasi ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun Dinas Perikanan pernah melakukan kunjungan untuk mendengarkan keluhan masyarakat, tidak ada tindak lanjut yang signifikan, mencerminkan ketidaksinkronan antara retorika pembangunan berkelanjutan dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan pandangan Harris (2000), proyek Reklamasi PIK 2 menunjukkan kesenjangan dalam penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan. Perubahan drastis di kawasan pesisir telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat setempat, terutama dalam menghadapi perubahan pola pergerakan air di wilayah pesisir. Respon institusional terhadap permasalahan lingkungan terkesan lamban dan tidak efektif, mencerminkan lemahnya kapasitas institusi dan sistem pengelolaan adaptif.

Meskipun menyandang status Proyek Strategis Nasional, implementasi PIK 2 masih jauh dari prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, untuk

memastikan pembangunan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan jangka panjang.

Meninjau Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Sosial

Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional telah menimbulkan berbagai dampak terhadap dimensi keberlanjutan sosial masyarakat Kecamatan Teluknaga. Analisis menggunakan perspektif Harris (2000) mengungkapkan kesenjangan signifikan antara prinsip-prinsip keberlanjutan sosial dengan implementasi proyek di lapangan.

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Desa Tanjung Pasir, upaya dialog masyarakat dengan pihak pengembang hanya berujung pada konfrontasi dengan aparat keamanan. Proposal pemecah gelombang yang diajukan paguyuban nelayan pun tidak mendapatkan tanggapan konkret meskipun telah melalui jalur formal hingga tingkat kecamatan. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dimana masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama justru diposisikan sebagai pihak eksternal dalam pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Situasi serupa terjadi di Kampung Sentiong, Desa Salemban Jati, dimana pihak pengembang melakukan urukan merah

tanpa sosialisasi atau musyawarah dengan penduduk setempat. Tindakan ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan perekonomian warga. Absennya komunikasi awal dari pengembang mencerminkan pendekatan pembangunan yang mengutamakan efisiensi fisik dengan mengorbankan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Eksklusi sosial juga terjadi dalam bentuk pembatasan akses masyarakat terhadap fasilitas publik yang dibangun oleh PIK 2. Di Desa Muara, penduduk setempat bahkan tidak diperbolehkan memasuki kawasan proyek untuk sekadar berekreasi, dengan akses hanya diberikan kepada pekerja proyek. Fenomena ini menciptakan segregasi spasial dan sosial yang paradoksal, dimana pembangunan justru memisahkan masyarakat dari fasilitas modern di wilayah mereka sendiri.

Permasalahan kompensasi juga menjadi sorotan penting, dimana bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak dinilai tidak sepadan dengan kerugian yang dialami. Distribusi bantuan berupa beras 5 kg dan minyak setengah liter yang hanya mencukupi kebutuhan tiga hari, serta penyalurannya yang tidak merata, mencerminkan pendekatan simbolis yang jauh dari upaya pemulihan keberlanjutan hidup masyarakat.

Berdasarkan konsep keberlanjutan sosial Harris, proyek reklamasi PIK 2 menunjukkan

kesenjangan signifikan dalam empat aspek fundamental, yakni pemerataan, penyediaan layanan sosial memadai, partisipasi politik, dan akuntabilitas. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa aspek-aspek ini belum terintegrasi secara memadai dalam proses pembangunan. Peran pemerintah Indonesia terlihat belum optimal dalam menjamin implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan sosial.

Evaluasi ini menggarisbawahi perlunya reformasi mendasar dalam pendekatan pembangunan untuk memastikan tercapainya keberlanjutan sosial. Diperlukan pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih efektif, sistem kompensasi yang adil dan berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Tanpa perubahan fundamental ini, proyek pembangunan berskala besar berisiko menciptakan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Meninjau Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ekonomi

Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional telah menimbulkan transformasi fundamental pada struktur ekonomi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekonomi menjadi aspek krusial yang perlu ditinjau, mengingat perubahan signifikan yang terjadi pada mata

pencaharian penduduk lokal. Harris (2000) menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi yang berkelanjutan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan, menghindari ketidakseimbangan sektoral, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kapasitas sumber daya lokal.

Transformasi spasial akibat pembangunan PIK 2 tidak hanya mengubah bentang alam pesisir Tanjung Burung, tetapi juga telah menggeser pola mata pencaharian tradisional masyarakat setempat. Fenomena yang menonjol adalah munculnya kesenjangan ekonomi, di mana lapangan pekerjaan baru yang ditawarkan belum mampu mengkompensasi hilangnya sumber pendapatan masyarakat dari aktivitas ekonomi tradisional. Sebelum adanya pembangunan PIK 2, nelayan dan penjaga tambak memiliki *passive income* yang menguntungkan, namun kini tambak-tambak ikan di kawasan Tanjung Burung telah hilang, mengakibatkan pendapatan dari pekerjaan baru yang tersedia tidak sebanding dengan penghasilan sebelumnya.

Di Desa Tanjung Burung terjadi penurunan pendapatan yang drastis, di mana masyarakat yang beralih profesi menjadi buruh di kawasan PIK 2 mengalami penurunan penghasilan signifikan. Meskipun proyek ini membuka lapangan pekerjaan baru, terdapat degradasi kualitas pekerjaan dan pendapatan. Sikap "bersyukur" yang

ditunjukkan masyarakat lebih mencerminkan posisi tawar yang lemah daripada kepuasan yang sesungguhnya terhadap perubahan yang terjadi.

Dampak serupa juga dirasakan oleh masyarakat nelayan di Desa Salemban Jati. Pemasangan jaring pembatas oleh pihak pengembang PIK 2 telah mengganggu pola migrasi ikan dan membatasi area tangkapan nelayan tradisional. Adanya larangan untuk menangkap ikan di kawasan proyek semakin mempersulit kondisi ekonomi para nelayan kecil. Akibatnya, nelayan yang tidak mampu bertahan terpaksa beralih profesi menjadi buruh dengan upah lebih rendah dan jam kerja lebih panjang.

Data menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan PIK 2. Nelayan yang sebelumnya menghasilkan Rp150.000-200.000 per hari, kini hanya menerima Rp60.000 per hari dengan beban kerja lebih berat mencapai 12 jam sebagai buruh di kawasan PIK 2. Penurunan pendapatan hingga 60-70% ini mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga. Pergeseran dari pekerjaan mandiri menjadi pekerja upahan telah mengikis kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketimpangan semakin nyata ketika manfaat ekonomi dari pembangunan cenderung dirasakan oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang tidak bergantung pada

sumber daya alam setempat. Pembangunan ini tidak hanya gagal memberikan dampak ekonomi yang adil bagi masyarakat Desa Muara, tetapi juga memperburuk kondisi bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, seperti para nelayan.

Dilema dan kesenjangan yang signifikan terlihat dalam dampak pembangunan PIK 2 terhadap berbagai kelompok masyarakat. Di satu sisi ada kelompok yang mendapatkan manfaat ekonomi melalui kesempatan kerja baru, sementara di sisi lain komunitas nelayan tradisional mengalami kerugian akibat perubahan ekosistem. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fenomena ini mencerminkan pola pembangunan yang masih bersifat ekstraktif, di mana keuntungan ekonomi jangka pendek lebih diprioritaskan dibanding keberlanjutan ekonomi jangka panjang masyarakat lokal.

Mengacu pada kerangka teoritis Harris, analisis terhadap pembangunan PIK 2 mengungkapkan kesenjangan signifikan antara ideal pembangunan berkelanjutan dengan realitas di lapangan. Transformasi ini menghadirkan paradoks di mana modernisasi wilayah pesisir justru mengancam ketahanan ekonomi jangka panjang penduduk lokal, bertentangan dengan prinsip keseimbangan sektoral yang menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak mengorbankan sektor ekonomi tradisional.

Demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Pemerintah dan pengembang perlu mengembangkan program pemberdayaan yang lebih substantif, pelatihan keterampilan intensif, dan mekanisme kompensasi yang lebih adil. Tanpa pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, proyek PIK 2 berisiko menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar dan merusak tatanan ekonomi tradisional masyarakat pesisir.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang awalnya diharapkan membawa kemajuan ekonomi, justru menimbulkan serangkaian masalah serius bagi masyarakat Kecamatan Teluknaga. Dampak negatifnya terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup pada sumber daya alam setempat.

Dari sisi sosial, transformasi ruang yang terjadi telah mengacaukan pola kehidupan tradisional masyarakat. Para petani dan nelayan menghadapi kesulitan akses ke sumber mata pencaharian mereka, sementara mobilitas warga terhambat akibat banjir yang kerap terjadi. Situasi ini diperburuk dengan adanya laporan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan

mereka, ditambah dengan meningkatnya polusi udara dan risiko keselamatan di sekitar area proyek.

Secara ekonomi, proyek ini telah menggeser sistem ekonomi lokal yang berbasis sumber daya alam menjadi lebih kompleks dan tidak menguntungkan masyarakat setempat. Ketimpangan ekonomi semakin terlihat jelas - mereka yang memiliki modal besar menikmati keuntungan, sementara masyarakat kecil semakin terpinggirkan. Meskipun ada peluang kerja baru yang tercipta, namun sifatnya temporer dan tidak sebanding dengan hilangnya mata pencaharian tradisional.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, proyek PIK 2 menunjukkan banyak kekurangan. Perubahan drastis pada ekosistem pesisir dilakukan tanpa antisipasi dampak yang memadai, menyebabkan gangguan serius pada keseimbangan alam. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat minim, dan kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka tanggung.

G. SARAN

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran baik yang semoga bisa bermanfaat bagi pemerintah setempat atau nasional maupun pihak pengembang PIK 2 terkait lebih besarnya eksternalitas negatif daripada manfaat yang dihasilkan terhadap

masyarakat sekitar, sebagaimana di bawah ini:

1. Agar pembangunan berjalan lebih inklusif, masyarakat yang terdampak perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga implementasi.
2. Pemerintah dan pihak pengembang harus mengembangkan skema pemberdayaan ekonomi yang lebih substantif bagi masyarakat terdampak. Program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di sekitar PIK 2 dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Selain itu, kompensasi ekonomi yang diberikan harus lebih adil dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara.
3. Pembangunan seharusnya tidak menciptakan eksklusi sosial bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, akses terhadap fasilitas yang dibangun di PIK 2 harus dibuka lebih luas bagi masyarakat sekitar, baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial. Pemerintah juga harus memastikan adanya kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat agar tidak semakin terpinggirkan akibat proyek ini. Demi menghindari ketimpangan lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini diawasi secara ketat dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). Sosiologi (skematik, teori dan terapan). Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Adile, J. M. (2016). Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1),160382.
- Amffa, M. (2020). “Kebijakan reklamasi pulau G dan dampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar wilayah reklamasi”. *SENSISTEK*, 104-107. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v3i1.13250>
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>
- Andi, Y., Trisutomo, S. and Ali, M. (2017) ‘MODEL REKLAMASI PANTAI SECARA BERKELANJUTAN KASUS: PANTAI KOTA MAKASSAR’, *TATALOKA*, 19(4), p. 339. Available at: <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.339-354>.
- Apriyanto, N., & Setyawan, D. (2020). Gambaran tingkat resiliensi masyarakat Desa Sriharjo, Imogiri pasca banjir. *Holistic Nursing and Health Science*, 3(2), 21–29. <https://doi.org/10.14710/hnhs.3.2.2020.21-29>
- Arzikhah, S. D., & Permana, Y. A. (2023). Kontroversi Reklamasi Pantai Ancol: Manfaat Ekonomi vs Kerusakan Lingkungan. *Journal of Citizenship*, 2(2). <https://doi.org/10.37950/joc.v2i2.425>
- Bramanti, A., & Riggi, M. R. (2009). Sustainable Interrelated Growth: a phenomenal approach. In *Advances in spatial science* (pp. 29–44). https://doi.org/10.1007/978-3-540-70924-4_2
- Brilian, A. P. (2023). Begini Kondisi

- Kampung yang Dikelilingi Tembok Tinggi Pembatas PIK 2. Detik. <https://www.detik.com/properti/berita/d-6864296/begini-kondisi-kampung-yang-dikelilingi-tembok-tinggi-pembatas-pik-2>.
- De Acosta, A. (2006). Chomsky on Anarchism. *International Studies in Philosophy*, 38(4), 159–160. <https://doi.org/10.5840/intstudphil200638446>
- Devrian, M. R., Nugraha, D. M., Fu'adin, A., Putri, A. D., Abdurrahman, A. H., & Kusuma, S. D. (2023). Persaingan Sumber Daya Alam: Konflik dan Intoleransi dalam Masyarakat. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 4(2), 96–103. <https://doi.org/10.53682/gjppg.v4i2.6554>
- Dewi, R. A. P. K., Robinson, P., Puspitarini, R. C., Maksin, M., Rizca Yunike Putri, Nuril Hidayati, & Deistiara Fitrianti. (2024). Relevansi Pembangunan Berkelanjutan dengan Risiko. *PERSPEKTIF*, 13(3), 767–784. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11660>
- Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. (2003). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Teluknaga. Diakses pada 5 November 2024, dari <https://id.scribd.com/document/767923121/BAB-5-POTENSI-DAN-MASALAH-ANTARA>
- Diposaptono, S. (2016). Build porous world maritime marine spatial planning in perspective. *Marine Spatial Planning Directorate, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Jakarta*.
- Djamil, M., Gumilang, M., & Hantono, D. (2022). Dampak reklamasi terhadap lingkungan dan perekonomian warga pesisir di jakarta utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(3), 296-303. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.35139>
- Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Fadilah, A. N. (2017). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Berkembangnya Objek Wisata Kalibiru (Studi Kasus: Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo). *E-Societas*, 6(7).
- Fajar, G., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2023). 'Evaluasi dampak sosial dan ekonomi pengembangan kawasan industri wilmar serang.' *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2), 232-238. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.654>
- Fauzi, A. (2004). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferguson, J. (1994). Anti-politics machine: Development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho. U of Minnesota Press.
- Firmansyah, T. (2016, April 14). Pengamat: Pulau Reklamasi Hanya untuk Orang Kaya. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/o5ma2d377/pengamat-pulau-reklamasi-hanya-untuk-orang-kaya>
- Flannery, W., Lynch, K., & Cinnéide, M. Ó. (2014). Consideration of coastal risk in the Irish spatial planning process. *Land Use Policy*, 43, 161–169. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.11.001>
- Ginting, S. W. (2010). Transformasi Spasial dan Diversifikasi Ekonomi Pada Wilayah PeriUrban di Indonesia. *Jurnal Arsitektur dan Perkotaan*, 1(1), 60-64
- Gugat, R. M. D., Abubakar, F., & Susanti, R. (2022). Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat & LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta. *Ijd-demos*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/ij>

- [d.v4i1.219](#)
- Gunawan, H. (2014). Kajian Teori Pareto Improvement dan Teori Pareto Efficiency Terhadap Reklamasi Pantai. *Jurnal Hukum Uniski*, 4(1), 1-9.
- Gunawan, N. A., & Ruyadi, Y. (2017). Analisis Perubahan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Blok Pekauman Desa Astana Dengan Keberadaan Tradisi Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Di Cirebon. *SOSIETAS*, 7(1).
- Harahap, I. H., & Suryana, N. (2019). Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan. *TATALOKA*, 21(4), 689-704.
- Harris, J. M. (2000). Basic principles of sustainable development. *Development and Comp Systems*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.15600>
- Hikmah, H. (2018). Reklamasi di teluk jakarta dan perubahan sosial pada masyarakat nelayan di cilincing jakarta utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6849>
- Jaya, A. (2004). Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Jehlen, M., & Said, E. W. (1994). Culture and imperialism. *The William and Mary Quarterly*, 51(4), 783. <https://doi.org/10.2307/2946944>
- Jiménez, D. J., Sabo, S., Remiker, M., Smith, M. A., Longorio, A. S., Williamson, H. J., ... & Teufel-Shone, N. I. (2021). A multisectoral approach to advance health equity in northern arizona: county-level leaders' perspectives on health equity.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1048269/v1>
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5 (2), 87–97.
- Kurniawan, T., Meidiana, C., Goh, H., Zhang, D., Jiang, M., Othman, M., ... & Goh, K. (2024). Social dimensions of climate-induced flooding in jakarta (indonesia): the role of non-point source pollution. *Water Environment Research*, 96(9). <https://doi.org/10.1002/wer.11129>
- Kusnanto, N. K. A. (2024). Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum. *Ethics and Law Journal Business and Notary*, 2(1), 58–63. <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>
- Lefebvre, H. (1991). The production of space. *The Production of Space*. <https://doi.org/10.4324/9780203132357-14>
- Liu, Y., Tang, S., Geertman, S., Lin, Y., & van Oort, F. (2017). The chain effects of property-led redevelopment in Shenzhen: Price-shadowing and indirect displacement. *Cities*, 67, 31–42. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.04.017>
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara -Tara I. E -Jurnal Acta Diurna, 4 (2).
- Mahendra, R. and Purwanti, T. (2023). Analisis dampak proyek pembangunan reklamasi pantai ancol jakarta utara terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan: tinjauan kritis. *Endogami Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 235-247. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.235-247>
- Marsella, M. H. and Putra, P. A. D. (2024). 'Analysis of independent city concept in reclamation area pik 1 & pik 2 based on community, government, and private sector role.' *Interaction, Community Engagement, and Social Environment*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/icese.v1i2.2024.416>
- Mustaqim, I. (2015). Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat Di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke,

- Kelurahan Pluit, Jakarta Utara). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 3-4.
- Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nieuwenhuijsen, M. (2021). Green infrastructure and health. *Annual Review of Public Health*, 42(1), 317-328. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102511>
- Nulhaqim, S., Hidayat, E., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya preventif konflik pengurusan lahan. *Share Social Work Journal*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25173>
- Nurhidayah, N. (2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian terpadu di joglo tani. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 129-148. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-07>
- Nurina, H. (2015). *Modal Sosial Sebagai Strategi Bertahan Hidup Warga Pasca Penggusuran (Studi Kasus: Warga Tergusur Buaran I, Klender, Jakarta Timur)* - repository. 89-90. <http://repository.unj.ac.id/758/>
- Pottie, K. (2015). Health equity in humanitarian emergencies: a role for evidence aid. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 8(1), 36-38. <https://doi.org/10.1111/jebm.12137>
- Prasetyono, P. and Dani, H. (2022). Identifikasi risiko pada pekerjaan proyek konstruksi bangunan gedung sebagai tempat tinggal. *Publikasi Riset Orientasi Teknik Sipil (Proteksi)*, 4(1), 42-47. <https://doi.org/10.26740/proteksi.v4n1.p42-47>
- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. (2017). Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 85-94. <https://doi.org/10.15578%2Fjkpi.9.2.2017.85-94>
- Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *VOX POPULI*, 6(1), 50-65.
- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Paper dipresentasikan dalam Seminar STIAMI. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Volume III, No. 1. 48.
- Rahmani, U. (2016). 'Studi aktivitas nelayan kamal muara dengan adanya reklamasi.' *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, 2(1), 56-66. <https://doi.org/10.53676/jism.v2i1.21>
- Ramdhani, F., Heltria, S., Magwa, R., Ramadan, F., Nofrizal, N., & Jhonnerie, R. (2023). Karakteristik dimensi utama kapal gillnet (static gear) pada penangkapan udang mantis (*harpiosquilla raphidea*) di kampung nelayan, jambi. *Akuatika Indonesia*, 7(2), 80. <https://doi.org/10.24198/jaki.v7i2.43530>
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>
- Rigo, I. D., & Qidam, A. (2020). Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 102-112.
- Royandi, E. and Keiya, R. (2019). 'Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi teluk Jakarta.' *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 77-98. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.3619>
- Said, E. W. (1994). *Culture and imperialism*. Vintage.
- Salim, E. (1990). Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Gramedia.
- Sampurna, R. H. and Chou, C. (2021).

- 'Policy networks: actors, interests, and power relations in the Jakarta Bay reclamation project.' *Journal of Government and Civil Society*, 5(2), 164.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4132>
- Soekanto, S. (1983). *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Srianti, A. (2018). 'Dampak reklamasi pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir laino.' *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(4).
<https://doi.org/10.36709/jppg.v3i4.4822>
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan ke-23. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhardi, N., & Raffiudin, N. R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *Vox Populi*, 6(1), 50–65. <https://doi.org/10.24252/vp.v6i1.39018>
- Suliyanto (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Supono, S. (2009). *Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan*. Disertasi.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217-222. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.1950>
- Wulandari, D. (2024). Paradoks pembangunan: analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap komunitas lokal dan keadilan multispecies. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 79-87.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.342>
- Zahira, Nadya. (2023). Di Balik Pembangunan PIK 2, Ada Tembok Tinggi yang Tutup Akses Warga. Katadata.
<https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/64c9e5b4bf260/di-balik-pembangunan-pik-2-ada-tembok-tinggi-yang-tutup-akses-warga>.

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpres No. 122/2012).
- UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil